Radar Bali

Kelian Lalanglasek Divonis 4 Tahun

Terbukti Korupsi, Terdakwa Langsung Banding

DENPASAR - Vonis berat dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar. Pada sidang kasus korupsi pembangunan Balai Banjar Lalangpasek, Tabanan, dengan terdakwa Nyoman Sukarya, 57, majelis hakim pimpinan I Wayan Sukanila

■ **KELIAN...**

Sambungan dari hal 21

Rabu (17/5) kemarin mengganjar terdakwa dengan hukuman 4 tahun penjara. Majelis hakim menilai terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan primer pasal 2 ayat 1 UU Korupsi.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nyoman Sukarya dengan pidana penjara selama empat tahun," tegas hakim Wayan Sukanila. Majelis hakim juga mengganjar terdakwa pidana denda Rp 200 juta subsider satu bulan kurungan, serta mengenakan pidana tambahan dengan mewajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 202.400.000. Dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu untuk membayar, maka dipidana penjara selama tiga bulan.

Sebelum menjatuhkan vonis, majelis hakim mengurai pertimbangan memberatkan dan meringankan. Yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas tindak pidana korupsi. Sedangkan yang meringankan, selama persidangan terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya. "Terdakwa sangat menyesal dan belum pernah dihukum," ujar Ketua Majelis Hakim Sukanila.

Vonis hakim lebih ringan 6 bulan dari tuntutan JPU Made Rai Joni Artha. Atas putusan majelis hakim, Sukarya didampingi penasihat hukumnya akan mengajukan banding. "Terima kasih yang mulia. Saya menyatakan banding," ujar Sukarya di muka persidangan. Sementara JPU Putu Nuriyanto bersama Ida Ayu Laksmi menyatakan pikir-pikir. Pasalnya dalam kasus ini, JPU sempat memohon supaya majelis hakim menuntut terdakwa dengan pidana empat tahun enam bulan, denda Rp 200 juta, subsider tiga bulan, dan membayar uang pengganti Rp 202.400.000, subsider enam bulan.

Berdasar dakwaan, kasus yang terjadi 2008 berawal saat warga Banjar Lalangpasek, Desa Cepaga, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, berencana merenovasi balai banjar. Saat itu, anggota DPRD Tabanan dari PDI Perjuangan yang juga warga banjar, I Ketut Suwardiana berkeinginan membantu membuat balai banjar. Lalu diadakan rapat dan terdakwa Sukarya selaku kelian banjar menyampaikan ke warganya.

Namun Banjar Lalangpasek hanya mempunyai dana Rp 75 juta. Sehingga untuk pembangunan dicarikan donatur, dan donatur itu adalah Suwardiana (saksi) dan Wayan Sukaja (saksi, mantan ketua DPRD Tabanan periode 2004 - 2009). Dalam rapat disepakati akan dibangun oleh saksi Suwardiana, dan pembangunannya selesai 2010, dengan catatan warga banjar wajib mendukung semua kegiatan politik Suwardiana. **(pra/mus)**

Edisi : Kamis 18 Mei 2017.

Hal : 21

Radar Bali

Korupsi Hibah Candikuning Kian Terang

TABANAN - Dugaan korupsi dana hibah dari provinsi kepada Desa Pekraman Candikuning senilai Rp 200 juta di tahun 2015 kian terang. Ini setelah Kejari Tabanan melakukan pemeriksaan terhadap puluhan saksi. Termasuk adalah Bendesa Pekraman Candikuning Made Susila Putra dan istrinya Ni Made Rinawati, kemarin (15/5).

Dalam pemeriksaan kemarin terungkap bahwa laporan pertanggungjawaban (LPJ) bantuan keuangan khusus (BKK) untuk kegiatan pesraman kilat terjadi penyimpangan. Pada LPJ disebutkan, pesraman kilat itu ada biaya pemesanan nasi untuk peserta pesraman kilat kepada Ni Made Rinawati yang merupakan istri bendesa.

"Istri bendesa saat pemeriksaan tadi mengakui tidak ada pemesanan nasi untuk pasraman kilat," kata Kasipidsus Kejari Tabanan IB Alit Ambara Pidada saat dikonfirmasi usai pemeriksaan terhadap bendesa pakraman dan istrinya, kemarin ■

▸ Baca **Korupsi...** Hal 35

Tersangka Masih Belum Ditetapkan

■ **KORUPSI...**

Sambungan dari hal 25

Menurut Alit, bahkan seluruh kegiatan pasraman senilai Rp 20 juta tidak dibiayai melalui dana BKK dari provinsi. Pasalnya, pesraman kilat itu sudah diselenggarakan secara rutin saat libur kenaikan kelas di SDN 1 Candikuning oleh pihak sekolah.

"Jadi, tidak ada pembiayaan sama sekali dari dana BKK untuk pasraman kilat itu. Cuma dalam laporan pertanggungjawaban dana BKK disebutkan untuk pasraman kilat," tukasnya.

Pun demikian dengan kegiatan *karya ngenteg linggih* pada Desember 2015. Menurut Alit, dengan dana BKK senilai Rp 156 juta dilaporkan untuk biaya *ngenteg linggih*. Padahal dalam kepanitiaan *karya*, itu tidak pernah disampaikan sumber dananya bersumber dari dana BKK. Melainkan dari iuran masyarakat dan dana bagi hasil pengelolaan Pura Ulundanu Beratan. Kebetulan selaku bendesa adat, Made Susila juga menjabat sebagai panitia sehingga mudah membuat proposal dan laporan pertanggungjawaban dana BKK.

"Tidak pernah disosialiasikan bahwa dana BKK untuk *karya ngenteg linggih*. Dana tidak pernah tercatat dalam *karya*. Tapi, dalam laporan pertanggungjawaban, dana BKK itu untuk *karya* juga," terangnya.

Dari dana Rp 200 juta, selain untuk kegiatan *pasraman* dan *karya*, juga dipakai untuk operasional *prajuru* Rp 31 juta, dan penunjang administrasi Rp 3 juta.

Susila dan istrinya diperiksa dari pukul 09.00 sampai 12.00. Menurut Alit, pemeriksaan saksi pun tinggal sedikit lagi. Rencananya, pekan depan memeriksa pihak Biro Keuangan Provinsi Bali. Dia belum bisa memastikan apakah butuh perhitungan kerugian negara dari BPK, maupun ahli dalam perkara ini. Susila mengaku dana BKK itu dipakai semua untuk *karya ngenteg linggih* yang totalnya menghabiskan dana Rp 1,5 miliar.

"Kami belum tentukan tersangka. Nanti setelah pemeriksaan saksi-saksi selesai, dan kami temukan minimal dua alat bukti, maka kami tetapkan tersangkanya," papar dia. (**yor/pit**)

Edisi : Selasa, 16 Mei 2017

Hal : 25 dan 35

Radar Bali

DANA HIBAH

Lambat Cair, Dewan Ngaku Muak

TABANAN - Anggota DPRD Tabanan kembali ribut soal dana hibah dari Pemda Tabanan untuk masyarakat yang difasilitasi anggota dewan. Pasalnya, hingga kini, dana hibah itu tak kunjung cair. "Jujur, ini sangat memuakkan sekali," kata Gede Purnawan, anggota DPRD Tabanan usai rapat paripurna internal DPRD Tabanan kemarin.

Purnawan mengaku jengkel lantaran setelah organisasi perangkat daerah (OPD) baru terbentuk, Bagian Keuangan Setda Tabanan lamban dalam mencairkan dana hibah. Kata dia, masyarakat yang menjadi konstituennya sampai empat kali bolak-balik ke Pemkab Tabanan untuk memperbaiki proposal. "Tapi tidak jelas apa kurangnya," tandas politikus PDIP asal Pupuan ini.

Hal ini diakui pula beberapa anggota dewan lainnya. Ketua DPRD Tabanan Ketut Suryadi juga mengaku memiliki salah satu konstituen dari Desa Lumbung. Namun, sudah bolak-balik dipanggil ke Pemkab Tabanan tak juga tuntas. "Saya sampai bilang, 'ya sudah, gak usah diurus," terangnya.

Ini pun ditimpali beberapa anggota dewan lain. Seperti Made Asta Dharma dari Fraksi Partai Demokrat. Juga Gusti Mayun, yang minta agar ada pemanggilan terhadap Bagian Keuangan Tabanan. Dari persoalan itu, akhirnya Komisi III DPRD Tabanan pun memutuskan akan memanggil Bagian Keuangan Tabanan Selasa ini (16/5). **(yor/rid)**

Edisi : Selasa, 16 mei 2017

Hal : 28